



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor/PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pentunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sekadau Tahun 2016 – 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
11. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau untuk:

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. melakukan evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Keselarasan Kinerja Dari Level Kabupaten ke Level SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) dan II (dua) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini:

- a. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sekadau diberikan tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
- b. Inspektorat Kabupaten Sekadau melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap SKPD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau.
pada tanggal 24 Mei 2017

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 24 Mei 2017

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

A. ADRIANTO GONDOKUSUMO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 22 Tahun 2017
 Tanggal : 24 MEI 2017
 Tentang : INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SEKADAU

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB KINERJA
1.	Meningkatnya Sektor Pertanian dan Perikanan	Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah PDRB Sektor Pertanian Th n} - \text{Jmlh PDRB sektor Pertanian Tn n-1}}{\text{Jmlh PDRB sektor Pertanian Tn n-1}} \times 100 \%$	BPS dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja - Dinas Perhubungan
2.	Meningkatnya Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor Terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah PDRB Sektor Perdagangan Th n} - \text{Jmlh PDRB sektor Perdagangan Tn n-1}}{\text{Jmlh PDRB sektor Perdagangan Tn n-1}} \times 100 \%$	BPS dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Persentase Pertumbuhan Akomodasi, makanan dan Minuman terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah PDRB Sektor Akomodasi makanan dan minuman Th n} - \text{Jmlh PDRB sektor Akomodasi makanan dan minuman Tn n-1}}{\text{Jmlh PDRB sektor Akomodasi makanan dan minuman Tn n-1}} \times 100 \%$	BPS dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Dinas Lingkungan Hidup

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB KINERJA
		Persentase Pertumbuhan Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan Th n} - \text{Jmlh PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan Tn n-1}}{\text{Jmlh PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan Tn n-1}} \times 100 \%$	BPS, Dinas Perhubungan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja - Dinas Perhubungan
3.	Meningkatnya Sektor Industri	Persentase Pertumbuhan Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah PDRB Sektor Industri Th n} - \text{Jmlh PDRB sektor Industri Tn n-1}}{\text{Jmlh PDRB sektor Industri Tn n-1}} \times 100 \%$	BPS dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
4.	Meningkatnya Iklim Usaha	Persentase pertumbuhan Koperasi dan UMKM	$\frac{\text{Jumlah koperasi dan UMKM tahun n} - \text{Jumlah Koperasi dan UMKM tahun n-1}}{\text{Jumlah Koperasi dan UMKM s/d tahun n}} \times 100 \%$	Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perdagangan	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
5.	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Sekadau	Nilai Investasi	$\frac{\text{Realisasi PMDN thn ini} - \text{Realisasi PMDN thn lalu}}{\text{Realisasi PMDN thn ini}} \times 100 \%$	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	- Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
6.	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur dan Aksesibilitas Pemerintah Daerah	Persentase jalan kondisi mantap	$\frac{\text{Panjang jalan Kabupaten kondisi mantap (KM)}}{\text{Total Panjang jalan kabupaten}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perhubungan
		Persentase jembatan kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jembatan kabupaten kondisi baik (KM)}}{\text{Total panjang jembatan kabupaten yg ada keseluruhan}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perhubungan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB KINERJA
		Persentase pasar yang tumbuh	$\frac{\text{Jumlah Pasar tahun } n - \text{Jumlah Pasar tahun } n-1}{\text{Jumlah Pasar s/d tahun } n} \times 100 \%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Desa yang dapat dilalui kendaraan roda empat	$\frac{\text{Jumlah desa yg bisa dilalui roda 4}}{\text{Jumlah desa}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perhubungan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi	$\frac{\text{Jumlah desa terhubung}}{\text{Jumlah desa}} \times 100 \%$	Dinas Komunikasi dan Informatika	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	7. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK	Opini BPK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Inspektorat
		Level Kapabilitas APIP	berdasarkan hasil penjaminan dari BPKP	Inspektorat	- Inspektorat
		Level SPIP	berdasarkan hasil penjaminan dari BPKP	Inspektorat	- Inspektorat
		Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	- Bappeda, Penelitian dan Pengembangan - Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) - Inspektorat
8.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks RB	Hasil Penilaian PMPRB Kabupaten	Inspektorat	- Inspektorat - Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) - Sekretariat DPRD - Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB KINERJA
					- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
					- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Indeks Persepsi Korupsi	Hasil Survei Persepsi Korupsi Kabupaten	Inspektorat	- Inspektorat
					- Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
					- Sekretariat DPRD
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Total nilai survei kepuasan masyarakat SKPD pelayanan publik ----- Jumlah SKPD Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					- Dinas Komunikasi dan Informatika
					- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
					- Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
					- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Puskesmas dan RSUD)
					- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					- Badan Pengelola Restribusi dan Pajak Daerah
					- Kecamatan
					- Dinas Lingkungan Hidup
					- Dinas Perhubungan
					- Dinas Komunikasi dan Informatika
					- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB KINERJA
9.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka kelulusan	$\frac{\text{Jumlah Lulusan pada jenjang SD dan SMP}}{\text{Jlh siswa tingkat tertinggi pd jenjang SD dan SMP}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan	- Dinas Pendidikan
		Rata-rata Lama sekolah	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tdk. Termasuk tahun yg mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yg pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yg pernah/sedang diduduki	BPS dan Dinas Pendidikan	- Dinas Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah	Lamanya Sekolah (dalam tahun) yg diharapkan akan dirasakan oleh anak pd umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yg sama saat ini.	BPS dan Dinas Pendidikan	- Dinas Pendidikan
10.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia harapan hidup	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yg mati pada umur tertentu}}{\text{jumlah penduduk pada umur tertentu}}$	BPS dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
					- Rumah Sakit Umum Daerah
					- Dinas Lingkungan Hidup
11.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Angka kesakitan	$\frac{\text{Jumlah kasus penyakit yang ada}}{\text{Populasi jumlah penduduk di suatu tempat}} \times 100\%$	BPS dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
					- Rumah Sakit Daerah
					- Dinas Lingkungan Hidup
11.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kualitas udara	Indeks kualitas udara x 100%	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Lingkungan Hidup
					- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					- Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB KINERJA
		Kualitas Air	Indeks kualitas air x 100%	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Lingkungan Hidup
					- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
					- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Lingkungan hidup sehat dan bersih	Jumlah timbunan sampah yang dikelola dengan 3R ----- x 100 % Volume sampah Kabupaten (dalam kota)	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Lingkungan Hidup
					- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
12.	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita :	Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita : $\frac{\text{Total Pengeluaran RT}}{\text{Jumlah RT}}$ Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita: $\frac{\text{Total Pengeluaran RT Non Pangan}}{\text{Jumlah RT}} \times 100$ $\frac{\text{Total Pengeluaran}}{\text{Jumlah RT}} \times 100$	BPS dan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	- Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
13.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun)}} \times 100 \%$	BPS dan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	- Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tingkat Pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100 \%$	BPS dan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	- Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB KINERJA
14.	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$	BPS dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana: Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: □ $G < 0,3$ = ketimpangan rendah □ $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang □ $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi</p>	BPS dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan terhadap Trantibum	$\frac{\text{Jumlah Kasus hasil operasi}}{\text{Jumlah kasus hasil operasi di tambah jumlah gangguan yg terdata}} \times 100 \%$	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	- Satuan Polisi Pamong Praja
16.	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Angka konflik per tahun	$\frac{\text{Jumlah konflik tahun sekarang (n) - jumlah konflik tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Jumlah konflik tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100 \%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
17.	Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan}}{\text{Jumlah perempuan}} \times 100 \%$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Angka kasus kekerasan terhadap Anak	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap anak}}{\text{Jumlah anak}} \times 100 \%$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18.	Menurunnya daerah Rawan Bencana	Persentase Penurunan Daerah Rawan Bencana	$\frac{\text{Jumlah penanganan Daerah Rawan bencana tahun x}}{\text{Jumlah Daerah Rawan bencana tahun x}} \times 100 \%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

II. Keselarasan Kinerja dari Level Kabupaten ke Level SKPD

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	Target Tahun						SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3	4	5	2016	2017	2018	2019	2020	2021	12	13	14	15	16
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	(1) Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.70%	(1) Meningkatnya Sektor Pertanian dan Perikanan	(1) Presentase Pertumbuhan sektor Pertanian terhadap PDRB	4.86%	4,9%	5.10%	5.30%	5.50%	5.70%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Meningkatnya Produksi Pertanian	1.Persentase peningkatan Produksi Perkebunan thd PDRB	1.Peningkatan Penerapan teknologi Perkebunan	1. Penyuluhan penerapan teknologi Pertanian/ perkebunan tepat guna
																2. Perluasan areal tanam
																3. Sosialisasi pengendalian kebakaran lahan dan kebun
															2.Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.Pembinaan Perkebunan Besar
																2. Rehabilitasi kebun karet rakyat
																3. Pelatihan budidaya perkebunan
																4. Sertifikasi bibit unggul perkebunan
																5. Pencatatan harga pasar
																6. Pengembangan pemberiham/ pembibitan
																7.Penyuluhan peningkatan produksi perkebunan
															3.Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	1.Pengembangan pengolahan hasil perkebunan
														2.Persentase peningkatan Produksi tanaman pangan terhadap PDRB	1.Peningkatan Penerapan teknologi Perkebunan	1. Pelatihan Statistik Pertanian
																2.Pelatihan pemberantasan Hama Terpadu
																3.Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi/Palawija
																4.Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian
														3. Persentase Peningkatan Produksi Horticoltura thd. PDRB	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.Pengembangan Bibit Unggul Pertanian /Perkebunan
																2.Pengembangan Pengolahan hasil pertanian
																3.Pembinaan sentra agribisnis sayuran
																4.Promosi atas hasil produksi unggulan daerah
														4.Persentase Peningkatan Produksi peternakan thd. PDRB	1.Peningkatan Produksi hasil peternakan	1.Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan temak
																2. Pembibitan dan Perawatan temak
																3.Pengembangan agribisnis peternakan
															2. Pencegahan dan Penanggulangan penyakit temak	1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular temak
															3.Peningkatan pemasaran produksi hasil peternakan	2. Pengawasan dan Pemeriksaan kesehatan hewan dan daging qurban
																3.Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan penyediaan bahan pangan asal hewan
																4.Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
																5.Penyuluhan pemasaran produksi peternakan
																6.Pengolahan Informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
														1. Persentase peningkatan produksi perikanan terhadap PDRB	1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Pemanuan hama penyakit ikan, residu, pakan dan obat ikan.
															2. Pengembangan budidaya perikanan	1. Pengembangan bibit ikan unggul

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	Target Tahun					SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan	
	1	2	3	4	5	2016	2017	2018	2019	2020						2021
																2. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
																3. Pembinaan dan pengembangan perikanan
														3. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan		Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi Perikanan
														4. Peningkatan kualitas sumberdaya kelautan dan perikanan		Penemuan kelompok pembudidaya ikan/helayan dan pengolahan hasil perikanan
														5. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan		Kajian Sistem penyuluhan perikanan
												Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas lahan pertanian	1. Persentase tingkat pencemaran Lahan	Pengendalian Pencemaran dan merusakn Lingkungan Hidup	1. Koordinasi Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)
														2. Persentase tingkat kebakaran lahan		2. Monitoring pemantauan Perijinan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL),UKL/UPL
																3. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan SPM Lingkungan Hidup
																4. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
																5. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
																6. Perlindungan dan konservasi Sumer Daya Aalam (SDA)
												Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya air	1. Rasio jaringan irigasi/rawa kondisi baik	1. Pengembangan dan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya lainnya	1.Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
														2. Panjang jaringan irigasi/rawa kondisi baik (Ha)	2. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengaliran lainnya	2. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya
															3. Pembangunan turap/talud/bronjong	3. Pembangunan jaringan irigasi
																4. Pembangunan pintu air
																5. Rehabilitasi/pemeliharaan
												Dinas Koperasi, Usaha kecil, menengah dan Perdagangan	Meningkatnya kelembagaan koperasi pada sektor pertanian	Persentase koperasi pertanian	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
																2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
												Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Meningkatnya investasi di sektor pertanian	Persentase investasi sektor pertanian	Peningkatan Investasi dan realisasi investasi	Peningkatan Kerjasama investasi antar pelaku usaha
												Dinas Perhubungan	Meningkatnya Sarana Transportasi Sektor Pertanian	Persentase Sarana Transportasi	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
		5,00	(2) Meningkatnya sektor perdagangan	(2) Persentase Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor Terhadap PDRB		4,89	4,91	4,94	4,97	4,99	5,00	Dinas Koperasi, Usaha kecil, menengah dan Perdagangan	Meningkatnya usaha perdagangan besar dan eceran	Persentase pertumbuhan usaha perdagangan besar dan Eceran terhadap PDRB	1.Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
															2. Peningkatan dan pengembangan ekspor	Pameran terpadu
															3. Peningkatan kerjasama perdagangan internasional	Penyiapan database kuota setiap jenis barang dan jasa
															3. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	1.Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
																2.Penyuluh disiplin pedagang kaki lima dan asongan
																3. Penataan tempat berusaha pedagang kaki lima dan asongan
																4.pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan
												Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Meningkatnya investasi perdagangan besar dan eceran	Nilai Realisasi Investasi perdagangan besar dan kecil	Peningkatan pelayanan perijinan	Pengembangan sistem pelayanan perijinan

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	Target Tahun						SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3			2016	2017	2018	2019	2020	2021					
			7,30		(3) Persentase Pertumbuhan Akomodasi dan makanan dan minuman terhadap PDRB	7,00	7,10	7,15	7,20	7,25	7,30	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	pengembangan pemasaran pariwisata	1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
														2. Persentase Penyediaan Akomodasi dan Rumah makan terhadap PDRB	Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. pelaksanaan Promosi Pariwisata Nisantra didalam dan diluar negeri
																2. Pelaksanaan Promosi Jaringan kerjasama promosi pariwisata
																3. Pengembangan objek pariwisata unggulan
																4. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
																5. pengembangan Daerah Tujuan Wisata
															Pengembangan Kemitraan	1. Pengembangan dan penguatan Informasi dan Database
																2. Peningkatan SDM dan Profesionalisme bidang pariwisata
																3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
												Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Meningkatnya investasi sektor akomodasi dan rumah makan	Persentase nilai investasi sektor akomodasi dan rumah makan	Peningkatan iklim investasi dan realisasi	Penyederhanaan prosedur penjinan dan peningkatan pelayanan penjinan
												Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya Mutu Pengawasan pangan dan bahan berbahaya	persentase Industri Rumah Tangga (IRT) dan Rumah Makan yang memenuhi standar kesehatan	Pengawasan Obat dan Makanan	1. peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat dibidang obat dan makanan
																2. peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
												Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Pengaduan masyarakat terhadap pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Pemantauan kualitas lingkungan
																2. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup
																3. Peningkatan peran serta masyarakat dim pengendalian Lingkungan Hidup
			8,59		(4) Persentase Pertumbuhan Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB	0	8,39	8,46	8,50	8,57	8,59	Dinas Koperasi, Usaha kecil, menengah dan Perdagangan	Meningkatnya Ketersediaan Pergudangan	Persentase ketersediaan Gudang	1. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Sosialisasi pembangunan pergudangan
															2. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1. peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
																2. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrotogian Daerah
																3. Pembinaan/Operasi Penerbitan alat ukur/Terakulung
																4. Pengadaan alat kemetrotogian
																5. Pembangunan Laboratorium
																6. Penyusunan Perda Pelayanan Tera dan Tera ulang
												Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Meningkatnya Investasi dan kualitas pelayanan perijinan sektor Pergudangan	1. Jumlah Investasi sektor Pergudangan	Peningkatan dan pengembangan penjinan	Pengembangan sitem pelayanan perijinan
														2. Jumlah ijin Pergudangan		
												Dinas Perhubungan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi Sektor Perdagangan	1. Jumlah sarana Transportasi	1. Peningkatan pelayanan Angkutan	1. Pengembangan sarana dan Prasarana Pelayanan jasa angkutan
														2. Jumlah prasarana Transportasi	2. Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan	2. Penyusunan kebijakan, norma standar dan prosedur bidang Perhubungan
																3. Pembangunan terminal bongkar muat barang

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	Target Tahun					SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan		
	1	2	3	4	5	2016	2017	2018	2019	2020	2021	12	13	14	15	16	
			6,54	(3) Meningkatnya sektor perindustrian	(5) Persentase Pertumbuhan kontribusi Industri Pengolahan terhadap PORB	5,61	5,67	5,82	6,1	6,21	6,54	Dinas Koperasi, Usaha kecil, menengah dan Perdagangan	Meningkatnya Produksi Sektor Industri	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PORB	1. Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM)	1. Fasilitas bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya	
																2. Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan kluster industri	
																3. Penyusunan Kebijakan Industri terkait dan industri penunjang kecil dan menengah	
																4. Fasilitas kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	
															2. Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	
															3. Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Pengembangan Kapasitas Prinata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	
															4. Program Peningkatan kemampuan Teknologi Industri	1. Pembinaan kemampuan teknologi industri	
																2. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	
															5. Penataan struktur Industri	Penyediaan Sarana dan prasarana kluster industri	
													Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Meningkatnya investasi sektor industri	Persentase nilai investasi sektor Industri	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penyelenggaraan pameran Investasi
			2,07%	(4) Meningkatnya iklim Usaha	(6) Persentase pertumbuhan Koperasi dan UMKM	1,66%	1,69%	1,73%	1,78%	2,01%	2,07%	Dinas Koperasi, Usaha kecil, menengah dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	1. Persentase Koperasi aktif	1. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	
																	2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
																	3. Pembangunan sistem informasi perencanaan dan pengembangan perkoperasian
																	4. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
																	5. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
															2. Persentase Usaha Mikro kecil	2. Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah (UKM)	1. Fasilitas peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Kecil, Mikro Kecil Menengah
																	2. Fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi
																	3. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
																4. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	
																5. Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan UMKM	
															3. Pengembangan sistem pendukung usaha pada UMKM	1. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan pemodalan	
																2. Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	
																3. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	
																4. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	
																5. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	
															4. Penciptaan iklim usaha yg kondusif	1. Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah (UKM)	
																2. Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah (UKM)	
																3. Fasilitas pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM)	
												Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UMKM	Persentase pertumbuhan koperasi dan UMKM	Program peningkatan pelayanan perijinan	Pengembangan sistem pelayanan perijinan	

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	Target Tahun					SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3	4	5	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			1.140,9	(5) Meningkatnya Investasi di Kab. Sekadau	(7) Nilai Investasi	458.50	550.20	660.24	729.30	950.75	1.140,9	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Meningkatnya Nilai investasi di kab. Sekadau	Realisasi investasi	1. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 2. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 3. Peningkatan dan pengembangan pelayanan perijinan 4. Pembinaan pemantauan pengawasan dan pengendalian 5. Penyusunan perencanaan penanaman modal daerah 6. Koordinasi perencanaan pengembangan penanaman modal 7. Promosi produk unggulan daerah 8. Pengendalian pelaksanaan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 9. Penyelenggaraan pameran investasi daerah 10. Pengembangan potensi unggulan daerah 11. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) investasi
												Dinas Koperasi, Usaha kecil, menengah dan Perdagangan	Meningkatnya investasi sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro	Nilai Investasi perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro	1. Peningkatan dan pengembangan ekspor 2. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 3. Pengembangan industri kecil dan menengah 4. Pengembangan sentra industri potensial 5. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah (UKM) 6. Pengembangan sistem pendukung usaha pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 7. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 8. Penyelenggaraan promosi produk UMKM
												Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Meningkatnya Investasi di sektor perumahan	Nilai Investasi sektor perumahan	1. pengembangan rumah 2. lingkungan sehat perumahan 3. Pengelolaan fasum perumahan 4. Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman manual pengelolaan pemukiman 5. Pembangunan dan prasarana pemukiman
												Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Meningkatnya Nilai investasi di sektor pariwisata	Nilai investasi sektor pariwisata	1. Program pengembangan kemitraan budaya 2. Pengembangan pemasaran pariwisata 3. Peningkatan sarana dan prasarana 4. Peningkatan peranserta masyarakat di pengembangan kemitraan pariwisata 5. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek 6. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi di pemasaran pariwisata pengembangan jaringan kerjasama promosi wisata 7. Koordinasi dgn sektor pendukung pariwisata 8. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri 9. Pemandu wisata terpadu

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	Target Tahun						SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3	4	5	2016	2017	2018	2019	2020	2021	12	13	14	15	16
		(1) Laju Pertumbuhan Ekonomi	75,50%	(6) Meningkatkan kapasitas infrastruktur dan Aksesibilitas pemerintah daerah	(8) Persentase jalan kondisi mantap	62,93%	64,93%	67,00%	69,83%	72,67%	75,50%	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Jalan dengan kondisi mantap	1. Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Perencanaan pembangunan jalan
															2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	2. pembangunan jalan
															3. Pembangunan saluran drainase/ Golong-royong	3. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
															4. Pembangunan sistem Informasi/ database jalan dan jembatan	4. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
															5. pembangunan saluran drainase / Gorong-gorong	
															6. penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	
															7. pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	
															8. rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat	
															9. rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat	
															10. penyusunan sistem informasi database jalan	
												Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana Transportasi	Persentase Kebutuhan Sarana Transportasi	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan
															2. pengadaan/pemasangan Warning light	
															3. pengadaan/pemasangan Penunjuk arah jalan	
															4. pengadaan/pemasangan pemasangan trafficlight	
			74,45%		(9) Persentase jembatan kondisi baik	66,67%	68,33%	69,78%	71,34%	72,90%	74,45%	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase jembatan dengan kondisi baik	1. Pembangunan jalan dan jembatan	1. Perencanaan pembangunan jembatan
															2. Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	2. Perencanaan pembangunan jembatan
															2. Pembangunan jembatan	
															3. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	
															4. Pembangunan jembatan	
															5. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	
															6. penyusunan sistem informasi database jembatan	
												Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kualitas Prasarana Transportasi Darat	Persentase Ketersediaan Prasarana	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	pengadaan rambu-rambulalu lintas
			7,14%		(10) Persentase pasar yang tumbuh	33,33%	25%	20%	16,66%	7,69%	7,14%	Dinas Koperasi, Usaha kecil, menengah dan Perdagangan	Meningkatnya usaha perdagangan besar dan eceran	persentase kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk dalam negeri
												Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Meningkatnya Kualitas Rencana Tata Ruang	Persentase Wilayah Pasar sesuai peruntukannya	pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
												Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Pencemaran Air, Tanah dan Udara	Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	1. proses perijinan Analisis Dampak lingkungan (AMDAL) Upaya Kelestarian Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemeliharaan Lingkungan (UPL)
															2. Sosialisasi Pembinaan Terhadap pelaku pasar	
												Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat	Persentase Lingkungan pasar yg memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	Pengembangan Lingkungan sehat	1. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan sehat
												Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap keterlibatan umum	Gangguan terhadap Transtibum	Pemeliharaan Transtibum dan Tindak Kriminal	1. Patroli monitoring gangguan Transtibum pengendalian kebisingan dan gangguan dan kegiatan masyarakat
															2. Operasi penertiban PKL	
			75,86%		(11) Persentase Desa yang dapat dilalui kendaraan roda empat	59,77%	65,52%	70,11%	72,41%	73,56%	75,86%	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Jalan dan Jembatan	Persentase Desa yang dapat dilalui kendaraan roda empat	1. pembangunan Infrastruktur perdesaan	pembangunan jalan dan jembatan pedesaan

No	Tujuan	1	Indikator Tujuan	2	Target 2021	Sasaran Strategis	4	Indikator Kinerja Utama	5	2016	2017	2018	2019	2020	2021	SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	13	14	Program	15	16	Kegiatan																																																																																																																																																																												
	Indikator Tujuan	3	Target 2021	Sasaran Strategis	4	Indikator Kinerja Utama	5	2016	2017	2018	2019	2020	2021	SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	13	14	Program	15	16																																																																																																																																																																															
2	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa	(2) Opat BPK	WTP	(7) Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	(13) Opat BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektoral	Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																																																																																																								
																												Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																																																																																												
																																								Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																																																																																
																																																				Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																																																																				
																																																																Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																																																								
																																																																												Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																																												
																																																																																								Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																																
																																																																																																				Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																				
																																																																																																																Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																								
																																																																																																																												Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																												
																																																																																																																																								Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																
																																																																																																																																																				Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																				
																																																																																																																																																																Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																								
																																																																																																																																																																												Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah												
																																																																																																																																																																																								Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah
Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																																																																																																																								
												Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																																																																																																												
																								Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																																																																																																
																																				Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																																																																																				
																																																Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																																																																								
																																																												Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																																																												
																																																																								Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																																																
																																																																																				Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																																				
																																																																																																Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																								
																																																																																																												Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																												
																																																																																																																								Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																
																																																																																																																																				Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																				
																																																																																																																																																Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																								
																																																																																																																																																												Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																												
																																																																																																																																																																								Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																
																																																																																																																																																																																				Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah				
Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																																																																																																																								
												Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																																																																																																												
																								Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																																																																																																
																																				Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																																																																																				
																																																Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																																																																								
																																																												Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																																																												
																																																																								Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																																																
																																																																																				Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																																				
																																																																																																Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																																								
																																																																																																												Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																												
																																																																																																																								Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																																
																																																																																																																																				Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																																				
																																																																																																																																																Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																																								
																																																																																																																																																												Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																												
																																																																																																																																																																								Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah																
																																																																																																																																																																																				Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/Aspirasi Ases/Berang Daerah	8. Validasi dan Pelaporan Kas Daerah				
Meningkatnya Kualitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Nilai Kepuasan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan KUA PPAS	2. Penyusunan RKA dan DPA	3. Penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	4. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penastusahan keuangan Daerah	5. Penyusunan Laporan Keuangan	6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	7. Revisi/																																																																																																																																																																																									

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	Target Tahun						SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3			2016	2017	2018	2019	2020	2021					
																2. Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Internal
																3. Evaluasi SPIP
																4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		(5) Nilai SAKIP	BB		(16) Nilai SAKIP	C	CC	B	B	BB	BB	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja	Nilai Perencanaan Kinerja	Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
																2. Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
																3. Penetapan RPJMD
																4. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
																5. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
																6. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
																7. Penyusunan rancangan rencana kerja penda (RKPD-P)
												Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2. Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja	Nilai Pengukuran Kinerja	1. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
																2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
																3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
												Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	3. Meningkatkan Kualitas Laporan Kinerja Instansi pemerintah	Nilai pelaporan Kinerja	2. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
																2. Penyusunan Perjanjian Kinerja
																3. Asistensi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan LKIP SKPD
												Inspektorat	4. Meningkatkan Kualitas Evaluasi Kinerja	Nilai Evaluasi Kinerja	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1. Evaluasi berkala temuan hasil Pengawasan (kegiatan reviu LKIP Pemkab)
																2. Evaluasi berkala temuan hasil Pengawasan (kegiatan Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD)
												Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Sekretariat Daerah	5. Meningkatkan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Capaian Kinerja	Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
																2. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
																3. Penetapan RKPD
																4. Penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah daerah perubahan (RKPD-P)
		(6) Indeks RB	B	(8) Meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi	(17) Indeks RB	-	-	D	C	CC	B	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1. Terwujudnya sistem dan Mekanisme kerja dan organisasi serta pola pikir dan budaya kerja aparatur lebih baik	Nilai Manajemen Perubahan	1. Pembinaan Aparatur dan Pengembangan Aparatur	1. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
																2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
																3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
																4. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
												Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Penyusunan Rencana kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
																2. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	Target Tahun						SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3			2016	2017	2018	2019	2020	2021					
																3.Fasilitasi sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
																4.Publikasi peraturan perundang-undangan
																5.Monev produk hukum
																6.Pengkajian dan penelaahan keputusan Bupati
																7.Pengkajian dan penelaahan perbup
												Sekretariat DPRD	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah	optimalnya fasilitas peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat	1.Pembahasan rancangan Raperda
																2.Rapat-rapat Paripurna
												Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) dan Dinas Komunikasi dan Informatika	3.Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas organisasi secara proporsional	Nilai Penataan dan penguatan organisasi	Penatan Daerah Otonomi Baru	1.Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah otonom baru
																2. Evaluasi Pelaksanaan Tupoksi
																3. Penataan Organisasi Perangkat Daerah
													4.Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Sistem, proses dan prosedur kerja	Nilai Penataan Tataaksana	1.Pembinaan Aparatur dan Pengembangan Aparatur	1.Fasilitasi Penyusunan dan Verifikasi Standar Operasional Prosedur
																2.Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
																3. .pengkajian dan pengembangan sistem informasi
															2. Pengembangan Komunikasi informasi dan media massa	4. Layanan akses internet dan intranet Pemerintah Daerah
															3. Pengelolaan E-Government di lingkup Pemerintah Daerah	1. Penyusunan Instrumen Anjab dan Analisis Beban Kerja PNS
												Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) dan Badan Kepegawain dan Pengembangan SDM	5.Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur	Nilai Penataan Sistem Managemen SDM	1.Pembinaan Aparatur dan Pengembangan Aparatur	2.Penyusunan Evaluasi Jabatan
																3.Penyusunan Formasi PNS Kab Sekadai
																4.Penyusunan standar Kompetensi
																5.Pemetaan Potensi PNS
																6.Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
																7.Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
																8 Seleksi Penerimaan Calon PNS
																9 Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
																10.Proses Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
																11.Pemberian Pertimbangan Penjatuh Hukum disiplin PNS
																12.Penempatan PNS
																13.Fasilitasi Penyelesaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
																15.Fasilitasi Pensiun PNS
															2.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
																2.Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
												Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Inspektorat	6.Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Penguatan akuntabilitas	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.Bimtek Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
																2.Bimtek Renstra
																3.Asistensi Penyusunan Renstra
																4.Penyusunan Pedoman Akuntabilitas Kinerja
																5. Pemutahiran Data Kinerja

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	Target Tahun						SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3			2016	2017	2018	2019	2020	2021					
												Inspektorat	7.Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Nilai Penguatan pengawasan	1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	6.Pengelolaan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis Elektronik
																1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
															2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2. Kegiatan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
																3. Kegiatan Diklat Teknis Pembentukan Auditor
																4.Kegiatan Diklat Teknis Perjenjangan Auditor
																5.Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
																6.Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran responsip gender
																7.Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa
																8.Evaluasi Pelayanan Publik
																9. Rapat koordinasi pengawasan daerah
												Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	8.Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Peningkatan kualitas layanan publik	Pembinaan Aparatur dan Pengembangan Aparatur	1. Penyusunan Laporan IKM
																2.Fasilitasi Penyusunan SPP
																3. Penyusunan standar pelayanan minimal
	(7) Indeks Persepsi Korupsi		84		(18) Indeks Persepsi Korupsi	-	76	78	80	82	84	Inspektorat	Meningkatnya Penerapan Standar Pelayanan Publik	Tingkat Penerapan SOP Pemerintah Kabupaten	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.Pemeriksaan Secara Berkala (Kegiatan Pemeriksaan/ Audit Kinerja)
																2.Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan (kegiatan Reviu Kepatuhan Terhadap SOP)
																3.Sapu Bersih Pungutan Liar
																4.Pengawasan dan Pengamanan pemerintah Pembangunan Daerah
																5.Pengamanan Laporan gratifikasi
																6.Monev Aksi Pencegahan Korupsi
																7.Verifikasi Pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi
																8.Verifikasi LHKPN/LHKASN
																9.Penilaian Internal Zona Integritas
																10.Penanganan Benturan Kepentingan
																11.Penanganan Whistle blower system
																12.Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
																13.pemeriksaan serentak kas opname
																14.Reviu/Monev Penyerapan dana Desa
																15.Pemeriksaan Dana Bos
																16. Sosialisasi pencegahan korupsi
												Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Meningkatnya penataan produk Hukum Daerah	Persentase produk Hukum Daerah yang di tindak lanjuti	Penataan produk Hukum Daerah	Legislasi rancangan produk hukum Daerah
												Sekretariat DPRD	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintah Daerah	Optimalnya fasilitasi peran dan fungsi DPRD	Persentase pengawasan terhadap pembangunan daerah	1. Kunjungan Kerja
																2. Rapat alat kelengkapan dewan
												Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang tertib administrasi	peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	1. pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan
																2.pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
												Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya peningkatan pelayanan berbasis E- Governance	1.Persentase pengadaan barang dan jasa secara Elektronik	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1. pengkajian dan pengembangan sistem informasi

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	Target Periaahun						SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3			4	5	2016	2017	2018	2019					
														2.Persentase pengaduan layanan pengaduan secara elektronik	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	2.fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik
												Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah hasil perencanaan pembangunan Daerah	1.Persentase hasil litbang yg di TL Target: 30%	Pengembangan data dan Informasi	1.Penyusunan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
														2.Persentase Dok. Rencana ekbang yg di TL Target: 40 %		2.Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan
														3.Persentase Dok. Rensosbudkesra yg di TL Target 40 %		3.Penyusunan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
														4.Persentase Dok. renpem yg di TL Target: 40 %		4.Penyusunan sistem informasi monitoring evaluasi kinerja pembangunan (SIMEKBANG)
														5.Persentase Dok. Ren KJD Yg di TL Target : 40 %		
	(8) Indeks Kepuasan Masyarakat	90			(19) Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	82	84	88	90	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
												Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1.pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat
																2.fasilitasi penanganan pengaduan
																3.penyusunan protosal inovasi teknologi pengaduan
																4.pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi melalui Media
															Peningkatan kulitas pelayanan publik	1.peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan
																2.penataan, penerbitan perijinan reklame
																3.penyusunan standar pelayanan minimal
																4.pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat
																5. Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
																6.Penyusunan SOP Pelayanan
												Puskesmas (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat	perbaikan gizi masyarakat	1. Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Buruk, Gangguan Akibat Kurang Yodium, Kurang Vitamin A dan kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
																2.Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga sadar Gizi
												RSUD (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Meningkatnya Kualias Pelayanan Kesehatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Penyusunan Akreditasi Rumah Sakit
												Dinas Dukcapil	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
												Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
												Kecamatan	Meningkatnya Kualias Pelayanan Kesehatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Penataan Daerah Otonomi Baru	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
												Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Proses Perijinan AMDAL, UPL-UKL dan SPPL

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	Target Tahun						SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3	4	5	2016	2017	2018	2019	2020	2021	12	13	14	15	16
												Dinas Perhubungan	Meningkatnya Pelayanan Umum terhadap Masyarakat yang memiliki kendaraan	Indek Kepuasan Masyarakat	Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1.Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan bermotor
																2.Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor
																3.Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
																4.Peningkatan Kompetensi Penguji
												Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Kualitas Pelayanan LPSE	Indek Kepuasan Masyarakat	Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Pemantauan Isu Publik Pendapat Umum dan aduan masyarakat
												Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya Pelayanan penerbitan ijin usaha jasa konstruksi	Indek Kepuasan Masyarakat	Pembinaan Penyelenggaraan jasa Kontruksi	Penerbitan ijin Usaha Jasa Konteruksi nasional
												Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Meningkatnya pelayanan perijinan dan sertifikasi perumahan	Persentase pelayanan perijinan sertifikasi Perumahan	Penerbitan Perijinan dan sertifikasi Perumahan	1. Penyiapan bahan penerbitan perijinan pembangunan dan pengembangan Perumahan
																2. Penyiapan bahan rekomendasi ijin mendirikan bangunan (IMB) untuk pembangunan dan pengembangan Perumahan
																3. Penyiapan bahan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)
													Meningkatnya pelayanan Perijinan dan sertifikasi kawasan Permukiman	Persentase pelayanan Perijinan dan sertifikasi kawasan Permukiman	Penerbitan Perijinan dan sertifikasi Permukiman	1. Penyusunan PHD tentang perijinan pembangunan dan kawasan Permukiman
												Badan Kesbang dan Politik	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indek Kepuasan Masyarakat	Pendidikan Politik Masyarakat	1.Penyuluhan Kepada Masyarakat
																2.Verifikasi Administrasi Partai Politik
3.	Terwujudnya SDM yang berkualitas dan	(9) Indeks Pembangunan Manusia	100%	(9) Meningkatnya Kualitas Pendidikan	(20) Angka kelulusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	1.Meningkatnya kualitas dan kuantitas PTK	Persentase guru S1/DIV	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	1. Pendidikan lanjutan bagi guru
																2. Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan
																3. Penyetaraan
													2. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa	Meningkatnya Kualitas Hasil Belajar Siswa	Angka Kriteria ketuntasan minimal (KKM)	1. Evaluasi Belajar Siswa
																2.Minat dan Bakat siswa
													3.Meningkatnya pemenuhan Sarpras bidang Pendidikan.	% skih memiliki sarpras min	Wajib Belajar 12 Tahun	1.Pengadaan Sarpras Pend.
																2. Pelatihan manaj. sarpras
													1.Meningkatnya APS	Angka Partisipasi Sekolah	Pendidikan Non Formal	1.Paket B
																2.Paket C
																3.Pend. Kursus
													2.Meningkatnya AMS	Angka Melanjutkan	Wajib Belajar 12 Tahun	1.Besiswa Transisi
																2.Sosialisasi dan Advokasi Pendidikan
													3.Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	Rasio Sekolah:Penduduk	Wajib Belajar 12 Tahun	1.Pembangunan USB
																2.Pembangunan Ruang Kelas Belajar
													4.Menurunnya Angka putus sekolah	Angka Putus Sekolah	Wajib Belajar 12 Tahun	1.Besiswa Retrieval
																2. Pendidikan Gratis bagi siswa miskin
													1.Meningkatnya APS	Angka Partisipasi Sekolah	Pendidikan Non Formal	1.Paket B
																2.Paket C
																3.Pend. Kursus
													2.Meningkatnya AMS	Angka Melanjutkan	Wajib Belajar 12 Tahun	1.Besiswa Transisi
																2.Sosialisasi dan Advokasi Pendidikan

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	Target Tahunan						SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3	4	5	2016	2017	2018	2019	2020	2021	12	13	14	15	16
													3.Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	Rasio Sekolah:Penduduk	Wajib Belajar 12 Tahun	1.Pembangunan USB
																2.Pembangunan Ruang Kelas Belajar
													4.Menurunnya Angka putus sekolah	Angka Putus Sekolah	Wajib Belajar 12 Tahun	1.Basiswa Retrieval
																2. Pendidikan Gratis bagi siswa miskin
		71 Tahun	(10) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	(23) Usia harapan hidup	70 Tahun	71 Tahun	71 Tahun	71 Tahun	71 Tahun	71 Tahun	71 Tahun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang optimal	Persentase pengunjung yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1 Upaya kesehatan masyarakat	1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
															2.pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung puskesmas/pustu dan jaringannya	2. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
												Rumah Sakit Umum Daerah	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang optimal	Persentase pengunjung yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	1. Kemitraan peningkatan kualitas dokter
												Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan Perkotaan	Persentase ketersediaan RTH	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	2. Kemitraan pengonatan lanjutan bagi pasien rujukan
																1. Pengembangan laman rekreasi/hutan kota
																2. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
																3. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
																4. Koordinasi penilaian kota sehat Adipura
		14%		(24) Angka kesakitan	16,28%	16%	15,50%	15%	14,50%	14%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1. penyemprotan Fogging sarang nyamuk
																2. Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
																3.pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
																4.Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
																5. peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit
												Rumah Sakit Umum Daerah	Meningkatnya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	1.Fasilitas pelayanan dan penunjang pelayanan kesehatan di Rumah sakit.	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pengadaan Alat Rumah Sakit
																Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor
														2.Persentase Ketersediaan tenaga medis di rumah sakit	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kemitraan Peningkatan Kualitas dokter dan Paramedis
												Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	Persentase Lingkungan Yang sehat dan Bersih	Pengelolaan Kebersihan Lingkungan	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
																2.Bimbingan Teknis Persampahan
																3.Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
																4.Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
																5.Mengumpulkan dan mengangkut sampah dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
																6.Melaksanakan penyapuan dalam kota
																7.Pendidikan lingkungan hidup/ adiwiyata melalui green dan clean school
																8.Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat dibidang Lingkungan
		82%	(11) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	(25) Kualitas udara	81,5%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	Dinas Lingkungan Hidup	Pencemaran Udara	Baku mutu Emisi	Peningkatan pengendalian polusi	1. Pemantauan kualitas lingkungan
																2. Pengawasan pelaksanaan kebijakan Lingkungan Hidup

[illegible]

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	Target Tahun						SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3	4	5	2016	2017	2018	2019	2020	2021	12	13	14	15	16
												Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya pengarusutamaan Gender	1.Indek pembangunan gender (IPG)	peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dim pembangunan	1. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peranserta dan kesetaraan gender
														2. Indeks pemberdayaan gender (IDG)		2. Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
			1.80%		(30) Tingkat Pengangguran terbuka	3.06%	2.75%	2.48%	2.23%	2.00%	1.80%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Persentase tingkat pengangguran terbuka	Peningkatan kesempatan kerja	1. Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi
																2. Pengadaan Balai latihan kerja
																3. Kerjasama pendidikan dan pelatihan kerja
												Dinas Koperasi, Usaha kecil, menengah dan Perdagangan	Meningkatnya usaha perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM	Persentase meningkatnya jumlah wirausaha	1. Pengembangan industri kecil dan menengah	1. Pembinaan IKM dim memperkuat jaringan klaster industri
															2. Peningkatan kemampuan teknologi industri	2. Pembinaan kemampuan teknologi industri
															3. Penataan struktur industri	3. Penyediaan sarana dan prasarana klaster industri
															4. Pengembangan kemitrausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	4. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
															5. Pengembangan sistem pendukung usaha pada UMKM	5. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan menen
												Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Sumber daya perempuan	1. Tingkat Partisipasi perempuan di bidang pemerintahan	Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1. Pembinaan organisasi perempuan
														2. Tingkat partisipasi perempuan di bidang ekonomi kreatif		2. Perneran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
	Terwujudnya SDM yang berkualitas dan sejahtera	(11) Angka Kemiskinan	5%	(14) Meningkatnya taraf hidup Masyarakat	(31) Persentase Penduduk Miskin	6,12%	6,08%	6,06%	6,02%	5,06%	5%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin	1. Tingkat Kesakitan	1. Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS	1. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
														2. Angka Putus Sekolah	2. Perlindungan Jaminan Sosial	2. Komunitas Adat Tertinggal (KAT)
														3. Pendapatan Perkapita		3. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
																4. Penanganan Masalah-masalah Strategis, Tanggap, Darurat, Terpadu (TAGANA)
												Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Meninkkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Tangga Sehat	Lingkungan Sehat Perumahan	Rehabilitasi Rumah tidak layak huni
			0,28		(32) Indeks Gini	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin	Persentase Masyarakat miskin	1. Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	1. Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
																2. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
4.	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang aman, tertib dan harmonis	(12) Angka Kriminalitas	33	(15) Meningkatnya keamanan dan ketertiban	(33) Persentase Penurunan Gangguan terhadap Transtibum	51	49	45	41	38	33	Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan terhadap Transtibum	Pemeliharaan Transtibmas dan tindak kriminal	1. Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan Narkoba
																2. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
																3. Penyuluhan pencegahan praktek perjudian
		(13) Angka konflik per tahun	0%	(16) Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	(34) Angka konflik per tahun	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Kesadaran dan peran serta Masyarakat dalam mengantisipasi potensi Konflik	Persentase Angka Konflik	Pemeliharaan kantranstibmas dan pencegahan Tindak Kriminal	1. Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
																2. Fasilitasi dan dan pembinaan Forum kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	Target Tahunan						SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3	4	5	2016	2017	2018	2019	2020	2021	12	13	14	15	16
		(14) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,17%	(17) Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	(35) Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	0,68%	0,51%	0,34%	0,34%	0,17%	0,17%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Perempuan	Tingkat Penurunan kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1.Fasilitasi upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan
																2.Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
														Partisipasi Perempuan dalam bidang Sosial, Ekonomi dan Politik	Peningkatan Peran serta dan Keseluruhan Gender dalam Pembangunan	Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
			0,26%		(36) Angka kasus kekerasan terhadap Anak	1,19%	0,93%	0,66%	0,53%	0,39%	0,26%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas hidup Anak	Persentase anak yang mendapat perlindungan terhadap tindak kekerasan	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	1.Fasilitasi upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan
																2.Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
														Nilai Pemenuhan Hak-hak Anak	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1.Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
		(15)menurunkan Resiko Bencana	22%	(18) Menurunnya daerah Rawan Bencana	(37) Persentase Penurunan Daerah Rawan Bencana	10,714%	12,500%	14,266%	16,071%	17,147%	22,321%	BPBD	Menurunnya Resiko Korban Bencana	Persentase Penurunan Resiko	1. Pencegahan dini Penanggulangan Korban Bencana Alam	1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
															2.Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	2.Fasilitasi Pembentukan desa tangguh
																3.Penanganan Bencana Alam
																4. Kordinasi Pembangunan Daerah rawan bencana
												Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kepedulian Masyarakat terhadap Lingkungan	Persentase Desa Peduli Lingkungan	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
																2.Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
																3.Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
																4.Rehabilitas Kawasan Tambang
																5.Pengebangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan
												Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Meningkatnya penyediaan dan rehabilitasi perumahan korban Bencana Kabupaten	Persentase penyediaan rehabilitasi perumahan	Program penyediaan dan rehabilitasi perumahan	1. Penyiaapan bahan penyelenggaraan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten
																2. Penyusunan dan penyediaan basis data perumahan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah
												Dinas Sosial, PP dan PA	Menurunnya masyarakat Penyandang Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan Angka Kesejahteraan Sosial	Layanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut Tanggap, Cepat, Darurat dan Kejadian Luar Biasa

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001